



Article Informations
Corresponding Email:
veroncurry2002@gmail.com

Received: 22/08/2025; Accepted:
11/01/2026; Published: 26/02/2026

KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP SURIAH PADA PEMERINTAHAN JOE BIDEN

I Gede Joseph Veron Yesayas

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Konflik di Suriah telah berkembang menjadi konflik internasional sejak keterlibatan Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu aktor utama yang memiliki kepentingan strategis di kawasan. Konflik ini melibatkan benturan antara kelompok pro-Rezim Bashar al-Assad dengan kelompok oposisi, yang sejak 2011 belum menemukan titik penyelesaian yang definitif. Ketegangan yang berlangsung di Suriah berdampak luas terhadap stabilitas kawasan dan turut memengaruhi kepentingan nasional negara-negara besar, termasuk AS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implementasi kebijakan luar negeri AS terhadap konflik Suriah, dengan fokus pada studi kasus intervensi militer di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen resmi, laporan kebijakan luar negeri, serta sumber akademik dan media yang relevan. Penelitian ini menggunakan kerangka teori *defensive realism*, intervensi militer, dan kepentingan nasional untuk memahami logika kebijakan yang dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Biden melanjutkan beberapa kebijakan pendahulunya, ia menerapkannya dalam kerangka yang lebih terkendali dan defensif. Kebijakan intervensi terbatas dilakukan untuk mencegah kebangkitan kelompok teroris, membatasi pengaruh Iran dan Rusia, mencegah proliferasi senjata kimia, serta merespons krisis kemanusiaan. Kebijakan ini mencerminkan prinsip *defensive realism* yang menekankan stabilitas, penahanan ancaman, dan penghindaran keterlibatan militer jangka Panjang.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Intervensi Militer, Kepentingan Nasional, Konflik Timur Tengah, Suriah.

Abstract

The conflict in Syria has escalated into an international conflict since the involvement of the United States (US) as a key actor with strategic interests in the region. This conflict involves clashes between pro-Bashar al-Assad regime groups and opposition groups, which have not found a definitive resolution since 2011. The ongoing tensions in Syria have had a broad impact on regional stability and have also affected the national interests of major powers, including the US. This study aims to analyze the form and implementation of US foreign policy towards the Syrian conflict, focusing on the case study of military intervention under President Joe Biden. The method used is a case study with a qualitative approach. Data were obtained through literature

review, analysis of official documents, foreign policy reports, and relevant academic and media sources. This study uses the theoretical frameworks of defensive realism, military intervention, and national interests to understand the logic of the policies implemented. The results show that although Biden continued some of his predecessor's policies, he implemented them within a more restrained and defensive framework. The limited intervention policy was implemented to prevent the resurgence of terrorist groups, limit the influence of Iran and Russia, prevent the proliferation of chemical weapons, and respond to humanitarian crises. This policy reflects the principles of defensive realism which emphasize stability, containment of threats, and avoidance of long-term military engagement.

Keywords: *United States, Military Intervention, National Interest, Middle East Conflict, Syria*

1. PENDAHULUAN

Konflik Suriah yang bermula pada 2011 sebagai bagian dari gelombang *Arab Spring* telah berkembang menjadi perang multidimensi yang melibatkan aktor domestik maupun internasional. Gelombang protes terhadap rezim Bashar al-Assad yang awalnya bernuansa politik domestik segera berubah menjadi konflik bersenjata, dengan hadirnya kelompok oposisi, milisi Kurdi, ISIS, serta campur tangan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, Iran, dan Turki¹. Kompleksitas ini menjadikan konflik Suriah bukan sekadar krisis internal, melainkan arena perebutan pengaruh geopolitik global.

Bagi Amerika Serikat (AS), Suriah memiliki nilai strategis karena terkait dengan upaya mencegah kebangkitan terorisme, menahan pengaruh Iran dan Rusia, serta menjaga stabilitas kawasan yang berdampak pada keamanan sekutu-sekutunya, termasuk Israel dan Turki². Intervensi AS telah berlangsung sejak era Obama melalui sanksi diplomatik dan operasi kontra-ISIS, dilanjutkan pada masa Trump dengan pendekatan yang lebih ofensif, hingga pada masa Joe Biden yang menekankan intervensi terbatas serta diplomasi multilateral³. Perubahan dinamika ini menegaskan pentingnya kajian mendalam terhadap kebijakan luar negeri AS, khususnya pada era Biden, yang dinilai lebih konsisten dengan prinsip *defensive realism*

¹ Council on Foreign Relations, *Syria's Civil War: Timeline and Analysis*, 20 Desember 2024.

² Fred H. Lawson, "The Dynamics of Syria's Civil War," *Journal of Contemporary Middle Eastern Studies* 10, no. 3 (September 2023): 215–238

³ Andrew J. Tabler, *America's Role in the Syrian Conflict* (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2023).

yakni menjaga keamanan nasional melalui strategi minimalis tanpa ekspansi militer besar-besaran⁴.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan memahami orientasi baru kebijakan luar negeri AS di Suriah yang bersifat lebih selektif dan defensif. Hal ini penting mengingat Suriah masih menjadi salah satu episentrum instabilitas kawasan Timur Tengah, di mana setiap langkah kebijakan AS berimplikasi langsung terhadap keseimbangan kekuatan global dan keamanan internasional⁵.

Penelitian sebelumnya oleh Charles Lister menunjukkan bahwa strategi Biden menghadapi “*dangerous stalemate*”, karena keterlibatan yang terbatas justru menimbulkan kebuntuan tanpa solusi politik yang jelas.⁶ Caroline Rose juga menekankan bahwa strategi *local resilience* Biden yang mendukung pemerintahan lokal di timur laut Suriah tidak cukup efektif jika tidak disertai rekonstruksi sipil jangka panjang⁶. Sementara itu, Andrew Tabler menyoroti risiko melemahnya aliansi strategis AS di kawasan apabila keterlibatan Biden tidak diimbangi dengan konsistensi politik dan diplomasi regional⁷. Tinjauan pustaka ini memperlihatkan bahwa terdapat perdebatan mengenai efektivitas strategi Biden, sehingga penelitian ini hadir untuk menganalisis lebih dalam arah kebijakan tersebut dalam kerangka teori *defensive realism*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis bentuk dan implementasi kebijakan intervensi AS di Suriah pada masa Joe Biden, (2) mengidentifikasi instrumen kebijakan terbatas yang dijalankan, baik dalam aspek militer maupun diplomasi, serta (3) menjelaskan sejauh mana prinsip *defensive realism* memengaruhi formulasi dan pelaksanaan kebijakan luar negeri AS di Suriah. Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan mengintegrasikan analisis dokumen resmi, laporan kebijakan, serta literatur akademik yang relevan melalui pendekatan kualitatif deskriptif-analitis.

⁴ Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics* (Reading, MA: Addison- Wesley, 1979).

⁵ Vladislav M. Zubok, *Geopolitics of the Syrian War* (Oxford: Oxford University Press, 2023).

⁶ Lister, Charles. “*Biden’s Syria Strategy Is a Dangerous Stalemate.*” Middle East Institute, 4 Feb. 2022.

⁷ Andrew Tabler, “*America’s Syria Policy Needs a Reset,*” *Survival: Global Politics and Strategy*, Vol. 64, No. 1 (2022): 93–108.

2. PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI INTERVENSI MILITER AMERIKA SERIKAT DI SURIAH PADA ERA JOE BIDEN

Kebijakan intervensi militer AS pada masa Joe Biden berfokus pada pendekatan terbatas. Biden melanjutkan operasi kontra-ISIS dengan serangan udara presisi dan penggunaan drone sebagai instrumen utama. Tujuan utamanya bukanlah pendudukan, melainkan pencegahan kebangkitan kembali jaringan terorisme yang berpotensi mengancam keamanan nasional maupun global⁸.

Selain itu, Biden mempertahankan pasukan terbatas di timur Sungai Efrat. Kehadiran ini penting untuk menyeimbangkan pengaruh Iran dan Rusia yang semakin kuat melalui dukungan mereka terhadap rezim Assad. Dengan menjaga basis kecil di kawasan strategis, AS dapat mengendalikan dinamika keamanan tanpa harus terlibat dalam perang darat yang berkepanjangan⁹.

Kebijakan ini juga terkait erat dengan penguasaan sumber daya strategis, khususnya ladang minyak di timur laut Suriah. Kendali atas sumber daya tersebut memberikan *leverage* bagi AS dalam melemahkan ekonomi rezim Assad serta memperkuat posisi diplomatiknya. Meski demikian, langkah ini memunculkan kritik keras dari Damaskus yang menuduh Washington melakukan eksploitasi ilegal¹⁰.

Di luar dimensi militer, pemerintahan Biden juga mengedepankan diplomasi multilateral. AS bekerja sama dengan sekutu NATO dan lembaga internasional untuk menekan Assad melalui sanksi ekonomi serta mengisolasinya di panggung internasional. Pendekatan ini memungkinkan AS mempertahankan stabilitas kawasan tanpa perlu meningkatkan keterlibatan militer secara besar-besaran.

KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT DI SURIAH PADA PEMERINTAHAN JOE BIDEN

Kebijakan AS di Suriah tidak bisa dilepaskan dari kepentingan nasionalnya. Pertama, AS menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui transisi

⁸ Eurasia Review, *The Islamic State: Background, Current Status, and US Policy Analysis* (2024).

⁹ Reuters, *Biden Administration Maintains Troop Presence in Syria* (2024).

¹⁰ BBC News, *Rocket Attack Hits US Base in Syria* (2023).

politik. Meski implementasinya sulit akibat kompleksitas konflik, Washington tetap menempatkan solusi politik sebagai kerangka utama dalam retorika kebijakan luar negerinya¹¹.

Kedua, kepentingan militer menjadi dasar kehadiran pasukan terbatas di Suriah. Kehadiran ini berfungsi sebagai pencegah (*deterrence*) terhadap kelompok teroris serta sebagai jaminan dukungan terhadap mitra Kurdi yang menjadi ujung tombak operasi darat¹².

Ketiga, kepentingan perang melawan terorisme tetap menjadi prioritas utama. Melalui operasi militer terbatas, AS berupaya menghancurkan sisa-sisa ISIS sekaligus mengurangi risiko keterlibatan besar-besaran yang berpotensi menimbulkan korban jiwa dan biaya politik tinggi¹³.

Keempat, aliansi strategis dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) dipandang vital. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas operasi militer, namun di sisi lain menimbulkan ketegangan dengan Turki yang menganggap SDF berafiliasi dengan kelompok separatis PKK. Hal ini menciptakan dilema bagi AS, yang harus menjaga keseimbangan antara mendukung mitra Kurdi dan mempertahankan hubungan baik dengan sekutu NATO.

PENGARUH PRINSIP-PRINSIP DEFENSIVE REALISM TERHADAP FORMULASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI SURIAH

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan AS di bawah Biden sangat dipengaruhi oleh prinsip *defensive realism*. AS tidak berusaha memperluas pengaruh militernya melalui pendudukan besar-besaran seperti di Irak, melainkan membatasi diri pada intervensi selektif dan terukur. Hal ini bertujuan menjaga kepentingan vital, menyeimbangkan ancaman dari Iran dan Rusia, serta mencegah eskalasi konflik yang lebih luas¹⁴. Dengan kata lain, strategi Biden dapat dipahami sebagai bentuk *restraint policy*.

¹¹ Fitzpatrick, M. (2022). *Reviving the Iran Nuclear Deal: What Will It Take?*. International Institute for Strategic Studies.

¹² Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), *Territorial Control Map*, 2024.

¹³ Sam Heller, "The Biden Administration and Syria: A Cautionary Commitment," *The Century Foundation*, 2023.

¹⁴ Stephen M. Walt, "The Enduring Relevance of the Realist Tradition," in *Political Science: The State of the Discipline*, ed. Ira Katznelson and Helen V. Milner (New York: W.W. Norton, 2002), hlm. 200.

Keterlibatan militer minimal, dipadukan dengan diplomasi multilateral, menunjukkan orientasi defensif yang konsisten dengan asumsi dasar *defensive realism*: negara lebih memilih mempertahankan status quo ketimbang mencari ekspansi yang berisiko memicu koalisi tandingan.

3. KESIMPULAN

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Suriah pada masa pemerintahan Joe Biden menunjukkan pola intervensi terbatas yang konsisten dengan prinsip *defensive realism*. Biden mempertahankan kehadiran militer minimal di timur Sungai Efrat, melanjutkan operasi kontra-terorisme terhadap ISIS, serta menjaga aliansi strategis dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Pendekatan ini dipadukan dengan diplomasi multilateral dan sanksi ekonomi terhadap rezim Assad, yang bertujuan menahan pengaruh Iran dan Rusia tanpa terjebak dalam perang darat berskala besar.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kepentingan nasional AS di Suriah meliputi tiga hal utama: pencegahan kebangkitan terorisme, pembatasan pengaruh Iran dan Rusia, serta stabilitas regional yang terkait dengan keamanan sekutu-sekutu AS. Intervensi terbatas ini memberi AS kemampuan untuk menjaga status quo, namun di sisi lain menimbulkan dilema strategis, terutama dalam hubungan dengan Turki dan dalam hal efektivitas penyelesaian politik di Suriah.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Biden di Suriah mencerminkan strategi defensif yang berupaya menyeimbangkan kepentingan keamanan dengan keterbatasan sumber daya dan tekanan politik domestik. Hal ini menegaskan bahwa AS memilih keterlibatan selektif—cukup untuk menjaga pengaruh, tetapi tidak sampai menciptakan eskalasi konflik yang lebih luas.

REFERENSI/DAFTAR PUSTAKA

Andrew J. Tabler, *America's Role in the Syrian Conflict* (Washington, DC: Brookings Institution Press, 2023).

Andrew Tabler, "America's Syria Policy Needs a Reset," *Survival: Global Politics and Strategy*, Vol. 64, No. 1 (2022): 93–108.

BBC News, *Rocket Attack Hits US Base in Syria* (2023).

Council on Foreign Relations, *Syria's Civil War: Timeline and Analysis*, 20 Desember 2024.

Eurasia Review, *The Islamic State: Background, Current Status, and US Policy Analysis* (2024).

Fitzpatrick, M. (2022). *Reviving the Iran Nuclear Deal: What Will It Take?*. International Institute for Strategic Studies.

Fred H. Lawson, "The Dynamics of Syria's Civil War," *Journal of Contemporary Middle Eastern Studies* 10, no. 3 (September 2023): 215–238

Kenneth N. Waltz, *Theory of International Politics* (Reading, MA: Addison-Wesley, 1979).

Lister, Charles. "Biden's Syria Strategy Is a Dangerous Stalemate." Middle East Institute, 4 Feb. 2022.

Reuters, *Biden Administration Maintains Troop Presence in Syria* (2024).

Sam Heller, "The Biden Administration and Syria: A Cautionary Commitment," *The Century Foundation*, 2023.

Stephen M. Walt, "The Enduring Relevance of the Realist Tradition," in *Political Science: The State of the Discipline*, ed. Ira Katznelson and Helen V. Milner (New York: W.W. Norton, 2002), hlm. 200.

Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), *Territorial Control Map*, 2024.

Vladislav M. Zubok, *Geopolitics of the Syrian War* (Oxford: Oxford University Press, 2023).